



INSPEKTORAT UTAMA

ittama.dpr.go.id

Hasil Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Tahun 2018

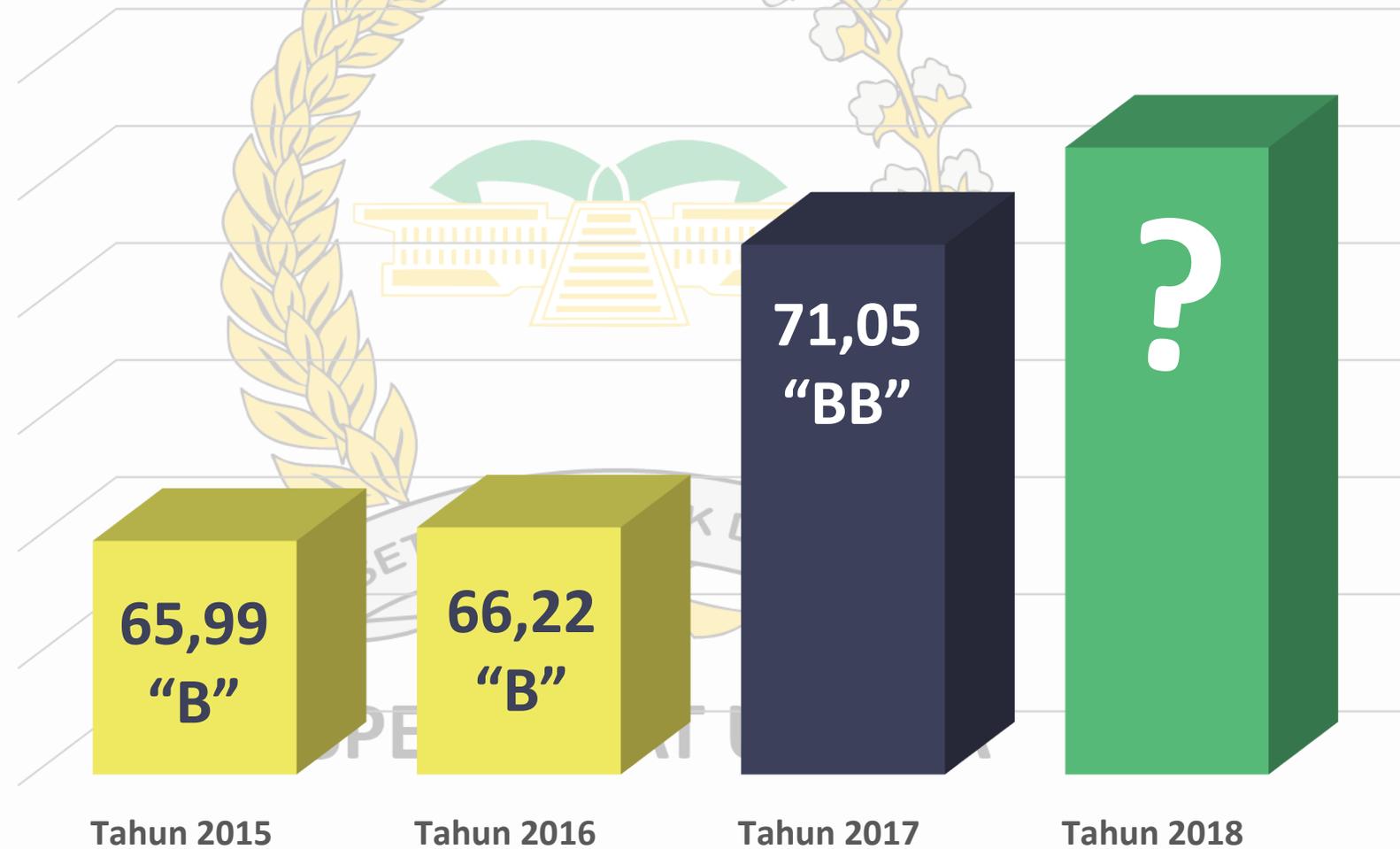
Oleh : Drs. Setyanta Nugraha, M.M.

15 APRIL 2019

http://bit.ly/RB_ITTAMA



Indeks reformasi birokrasi





Peraturan Presiden No. 81 Tahun 2010
Tentang Grand Design Reformasi Birokrasi Tahun 2010-2025

Peraturan Menteri PAN dan RB No. 11 Tahun 2015
Tentang Road Map Reformasi Birokrasi tahun 2015-2019

Pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada
Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat

Berpedoman pada : Peraturan Menteri PAN dan RB No. 30 Tahun 2018
Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri PAN dan RB No. 14 Tahun 2014
Tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah

TUJUAN :

**Peningkatan Kapasitas dan Akuntabilitas Kinerja,
Pemerintahan yang Bersih dan Bebas KKN, dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik**

UPAYA YANG TELAH DILAKUKAN



Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik melalui rekrutmen CPNS tahun 2018, seleksi terbuka untuk pengisian JPT, assesment terhadap pegawai secara bertahap, dan peningkatan kualitas SDM dengan pelaksanaan pengembangan karir dan potensi SDM melalui pendidikan dan pelatihan keterampilan maupun keahlian



Menetapkan nilai organisasi yaitu Religius, Akuntabel, Profesional, dan Integritas (RAPI)



Meningkatkan penggunaan IT dengan menggunakan 72 aplikasi berbasis IT, khususnya di seluruh unit eselon II

UPAYA YANG TELAH DILAKUKAN



Membangun Sistem Pelayanan Satu Atap untuk peningkatan pemberian pelayanan kepada Dewan dan pelayanan publik lainnya, serta telah menyusun norma, standar dan pedoman dalam bentuk SOP, Standar Pelayanan maupun proses bisnis dan telah memiliki dan melaksanakan pelayanan berdasarkan 1090 SOP



Mengimplementasikan penguatan pengawasan melalui penanganan gratifikasi, penerapan SPIP, pengaudan masyarakat dan Whistle-Blowing System, serta penanganan benturan kepentingan



Nomor : B/160/M.RB.06/2018 tanggal **31 DESEMBER 2018**

HASIL EVALUASI

No	Komponen Penilaian	Bobot	Nilai 2017	Nilai 2018
A	Pengungkit			
1	Manajemen Perubahan	5,00	4,11	4,14 △
2	Penataan Peraturan Perundang-undangan	5,00	3,34	3,44 △
3	Penataan dan Penguatan Organisasi	6,00	3,84	3,84
4	Penataan Tata laksana	5,00	3,60	3,38 ▼
5	Penataan Sistem Manajemen SDM	15,00	13,23	13,25 △
6	Penguatan Akuntabilitas	6,00	2,76	2,77 △
7	Penguatan Pengawasan	12,00	6,81	7,20 ▲
8	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	6,00	3,67	4,04 ▲
	Sub Total Komponen Pengungkit	60,00	41,36	42,06 △

HASIL EVALUASI

INSPEKTORAT UTAMA



No	Komponen Penilaian	Bobot	Nilai 2017	Nilai 2018
B	Hasil			
1	Kapasitas dan Akuntabilitas Kinerja Organisasi	20,00	11,42	12,87 ▲
2	Pemerintah Yang Bersih Dan Bebas KKN	10,00	9,62	9,23 ▼
3	Kualitas Pelayanan Publik	10,00	7,55	8,55 ▲
	Sub Total Komponen Hasil	40,00	29,69	30,65

Indeks Reformasi Birokrasi

100,00

71,05

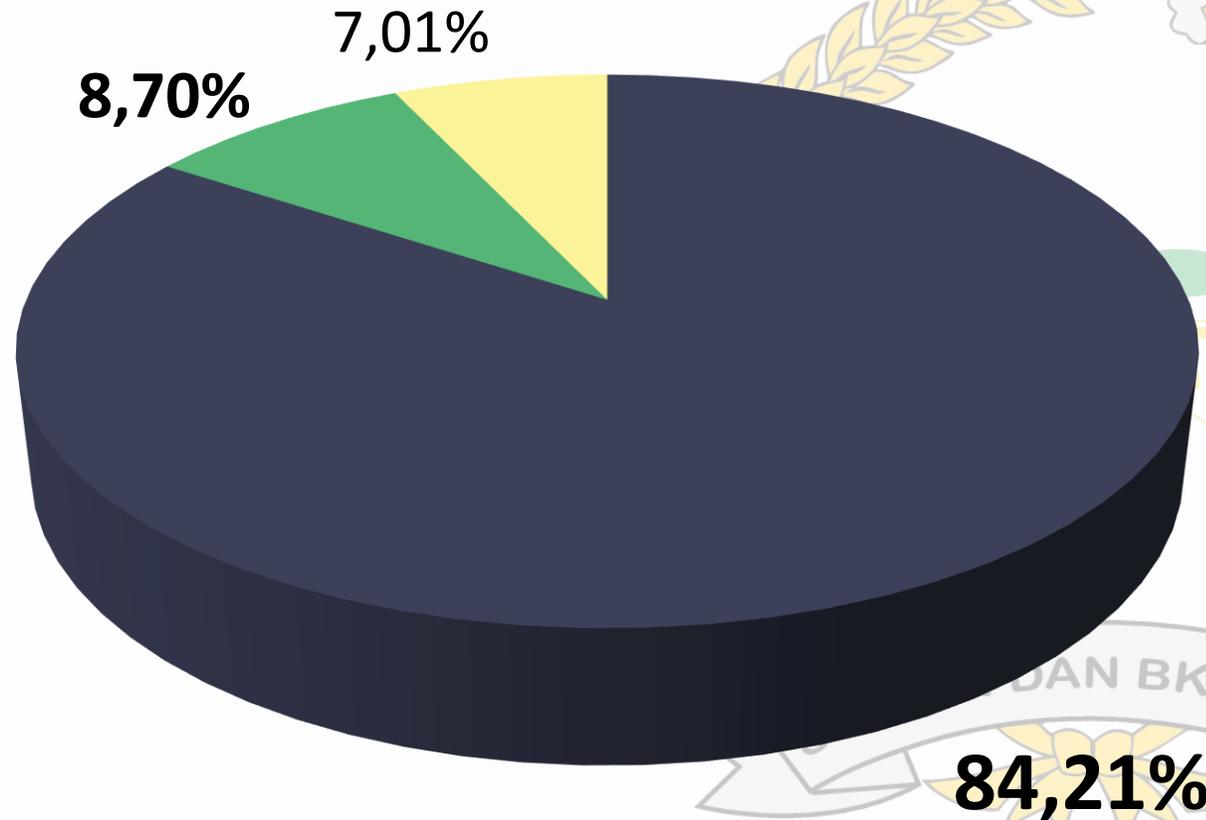
72,71

Pada komponen PENGUNGKIT Area 4 **PENATAAN TATALAKSANA** terjadi penurunan **0,94%** pada tahun 2017 sebesar **3,60** menjadi **3,38** pada tahun 2018.

Area 3 **PENATAAN DAN PENGUATAN ORGANISASI** tidak mengalami perubahan.

Kenaikan Signifikan dari tahun sebelumnya terjadi pada Area 7 Penguatan Pengawasan sebesar **0,96%** dan Area 8 **PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK** sebesar **0,91%**.

HASIL SURVEY INTERNAL



Mayoritas telah memahami tugas fungsi yang harus mereka laksanakan namun tidak memahami ukuran keberhasilan pelaksanaan tugasnya.

- Memahami tugas fungsi yang harus dilaksanakan namun tidak memahami ukuran keberhasilan pelaksanaan tugasnya
- Memahami tugas fungsi yang harus dilaksanakan dan memahami pula ukuran keberhasilan pelaksanaan tugasnya
- Belum memahami tugas fungsi dan ukuran keberhasilannya

HASIL INTEGRITAS ORGANISASI

INSPEKTORAT UTAMA



No	Komponen Penilaian	Indeks 2018
1	Budaya Organisasi dan Sistem Anti Korupsi	3,12
2	Integritas terkait pengelolaan SDM	3,23
3	Integritas terkait pengelolaan anggaran	3,23
4	Integritas kesesuaian perintah atasan dengan aturan dan norma	3,29
	Indeks Integritas Organisasi	3,22 ▼ (tahun 2017 = 3,35)

Indeks diatas menggambarkan persepsi para pegawai terhadap kualitas penerapan sistem integritas yang berlaku secara internal.

HASIL SURVEY EKSTERNAL

INSPEKTORAT UTAMA



INDEKS KUALITAS
PELAYANAN PUBLIK

3,43

(DALAM SKALA 4)

INDEKS PERSEPSI ANTI
KORUPSI

3,57

(DALAM SKALA 4)

**BELUM
MEMUASKAN**

Ditinjau dari sistem layanan yang mungkin berpotensi menyimpang dan perilaku pemberi layanan dalam bersikap

RAT UTAMA

PENYEMPURNAAN



14 POIN
yang harus
disempurnakan

Peningkatan Kualitas Penerapan Reformasi
Birokrasi serta lebih menumbuhkan Budaya Kinerja
di Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian
Dewan Perwakilan Rakyat

PENYEMPURNAAN

INSPEKTORAT UTAMA



1

Mengimplementasikan pelaksanaan reformasi birokrasi kepada seluruh unit kerja.

2

Konsistensi penerapan peran pimpinan sebagai role model dan penguatan agen perubahan, menetapkan target terukur dan melakukan monitoring secara berkala.

3

mengidentifikasi langkah-langkah perbaikan yang diperlukan, perubahan *mind set* aparatur berdasarkan nilai organisasi, perubahan apa yang ingin dicapai dan rencana tindak lanjutnya.

4

Memberikan pemahaman kepada pejabat dan pegawai akan arti pentingnya uraian tugas dan jabatan serta tugas fungsi serta ukuran keberhasilan dan pelaksanaan tugas dan fungsi dimaksud.

5

Penurunan indeks integritas organisasi Setjen dan BK DPR tahun 2018 dibandingkan dengan nilai tahun 2017 maka perlu memperbaiki sistem integritas yang telah dibangun terutama pada budaya organisasi anti korupsi secara berkala

PENYEMPURNAAN

INSPEKTORAT UTAMA



6

Hasil survei terhadap indeks persepsi anti korupsi terhadap pegawai Setjen dan BK DPR RI menunjukkan gambaran yang belum memuaskan. Oleh sebab itu, perlu diperbaiki sistem integritas dalam pemberian pelayanan di lingkungan Setjen dan BK DPR RI.

7

Dengan ditetapkannya PP No. 49 Th. 2018 tentang PPPK perlu segera menata pegawai di lingkungan Setjen dan BK DPR RI, sehingga seluruh pegawai dapat diklasifikasikan pada jenis pegawai yang dikenal dengan UU ASN atau PNS dan PPPK

8

Merencanakan kebutuhan pegawai dengan memperhatikan bentuk organisasi yang ideal, tepat fungsi, dan adaptif yang dapat diperoleh melalui hasil evaluasi kelembagaan secara berkala

9

Menyempurnakan rumusan ukuran kinerja secara berjenjang serta melaksanakan pemantuan dan pengukuran kerja tersebut secara elektronik diseluruh level organisasi secara berkala, melakukan penyelarasan antara kinerja yang akan dicapai dengan anggaran *real*, serta melakukan perbaikan atas hasil pemantauan capaian kinerja melalui perencanaan kinerja untuk tahun berikutnya



10

Menerapkan penilaian kinerja individu yang sesuai dengan kinerja organisasi pada seluruh formasi jabatan dan menetapkan hasil pengukuran kinerja individu sebagai dasar pemberian tunjangan kinerja yang didasarkan kepada kinerja

11

Meningkatkan penerapan e-government, tugas layanan koordinasi dengan stakeholder Setjen dan BK DPR dan mempercepat penerapan SPBE di bidang kearsipan yang berbasis elektronik yang terintegrasi

12

Diperlukan peningkatan maturitas SPIP dan kapasitas pengawasan intern dengan penilaian tingkat kapabilitas Inspektorat Utama (IACM) yang saat ini masih menuju level 3

13

Evaluasi pelaksanaan penanganan gratifikasi, implementasi kebijakan *whistle blowing system*, penanganan benturan kepentingan secara berkala dan menindaklanjuti hasil evaluasi tersebut

14

Melanjutkan pembangunan unit kerja yang akan diusulkan menjadi unit wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani (WBK/WBBM) dan setelah dilakukan evaluasi oleh APIP bagi yang lolos berdasarkan standar penilaian dapat diusulkan pada Tim Penilai Nasional dalam hal ini Kementerian PAN-RB



**NEW MINDSET
NEW RESULTS**

**TERIMA
KASIH**